

**Pembingkai Media Dalam Berita Pergub Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta  
(Studi Pada Media Detik.com dan Kompas.com)**

**Rafli Akram Kurniansyah**

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif  
Universitas Budi Luhur-Jakarta

Email: [2271600344@student.budiluhur.ac.id](mailto:2271600344@student.budiluhur.ac.id)

**ABSTRAK**

Munculnya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai polemik di kalangan masyarakat. Pergub ini menjadi sarat kontroversi terutama karena posisinya berada dalam isu kesetaraan gender terutama bagi kaum perempuan sebagai kaum yang termarjinalkan. Peran media dalam membingkai isu poligami tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya Indonesia. Proses ini memungkinkan media untuk memilih dan menonjolkan aspek tertentu dari sebuah peristiwa yang memengaruhi dan membentuk cara pandang masyarakat terhadap Pergub Poligami ASN tersebut. Berdasarkan permasalahan ini, kemudian peneliti tertarik untuk mengungkap pembingkai media dalam berita Peraturan Gubernur Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta yang dibingkai oleh Media *Online* Detik.com dan Kompas.com sebagai subjek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori analisis *framing* Robert N Entman yang meliputi dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu serta empat elemen *framing* yakni menjabarkan persoalan, menetapkan sumber penyebab masalah, menentukan keputusan moral, dan menetapkan penyelesaian permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan dalam pembingkai berita oleh media *online* yang menjadi subjek penelitian ini. Detik.com membingkai isu pemberitaan polemik ini dengan melihat dari sisi politisi yang turut mengkritik Pergub Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan, Kompas.com membingkai pemberitaan Pergub Poligami ASN ini dengan menyoroti informasi dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya penetapan peraturan gubernur baru ini. Adapun persamaan pembingkai berita di Detik.com dan Kompas.com yaitu kedua media *online* tersebut menekankan agar Pergub Poligami ASN yang baru ditetapkan oleh Pemprov DKI agar ditinjau kembali dan memerhatikan pada perspektif keadilan kaum perempuan.

**Kata kunci:** Detik.com; Kompas.com; Pembingkai Media; Pemprov DKI Jakarta; Pergub Poligami

**PENDAHULUAN**

Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan persepsi masyarakat terhadap berbagai isu sosial, politik, dan budaya. Media massa juga merupakan sebuah saluran komunikasi yang menjangkau khalayak luas dan dapat memengaruhi wacana publik (Budianto, 2019:1). Dalam konteks era digital saat ini, media daring menjadi salah satu saluran utama penyebaran informasi, yang mampu memengaruhi cara pandang masyarakat

---

terhadap suatu peristiwa atau kebijakan. Salah satu pendekatan yang digunakan media untuk menyampaikan informasi adalah melalui proses pembingkai berita (*framing*).

Dalam pembingkai berita merupakan suatu pendekatan dengan mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan oleh wartawan dalam menseleksi isu dan menulis berita (Wibisono, 2021:14). Proses ini tidak hanya berfungsi untuk menyajikan fakta, tetapi juga memberikan konteks, interpretasi, dan sudut pandang tertentu terhadap suatu isu. Dengan demikian, pembingkai berita berpotensi memengaruhi persepsi pembaca dan memberikan makna tertentu pada isu yang diberitakan.

Proses ini memungkinkan media untuk memilih dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari sebuah peristiwa atau isu, yang pada gilirannya dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap hal tersebut. Pembingkai dapat memperkuat atau meredakan interpretasi tertentu, tergantung pada pesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, pembaca perlu kritis dalam menerima informasi, dengan menyadari bahwa setiap pemberitaan membawa kecenderungan dan bias tertentu yang dapat memengaruhi opini publik.

Salah satu isu yang menarik perhatian publik dan menjadi sorotan media belakangan ini adalah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menolak. Di satu sisi, poligami sering kali dianggap sebagai isu sensitif karena berkaitan dengan nilai-nilai agama, budaya, dan hak asasi manusia. Di sisi lain, sebagai kebijakan publik, Pergub ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah daerah menangani isu-isu yang terkait dengan etika, moralitas, dan profesionalisme ASN.

Media Detik.com dan Kompas.com, sebagai dua media daring besar di Indonesia, memiliki audiens yang luas dan beragam. Kedua media ini sering kali dianggap memiliki gaya pemberitaan yang berbeda. Detik.com cenderung fokus pada penyajian berita secara cepat dan ringkas, sedangkan Kompas.com lebih dikenal dengan pendekatan yang mendalam dan analitis. Dengan perbedaan karakteristik ini, kedua media tersebut kemungkinan memiliki cara yang berbeda dalam membingkai isu Pergub Poligami ASN. Perbedaan pembingkai ini penting untuk diteliti

---

karena dapat mencerminkan bagaimana media memengaruhi opini publik dan mengarahkan diskursus sosial terkait isu tersebut.

Selain itu, peran media dalam membingkai isu poligami tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya Indonesia. Poligami adalah topik yang sarat kontroversi terutama karena posisinya di persimpangan antara ajaran agama, norma sosial, dan perspektif modern tentang kesetaraan gender. Dalam konteks ASN, isu ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan negara. Oleh karena itu, bagaimana media menyajikan berita terkait Pergub ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana isu-isu sensitif semacam ini diperlakukan dalam ruang publik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk memahami cara kerja media dalam membingkai isu, tetapi juga memberikan kontribusi bagi kajian tentang hubungan antara media, opini publik, dan kebijakan pemerintah. Media massa telah menjadi alat untuk menyalurkan aspirasi politik (Zamroni, 2022:56). Media massa juga berperan dalam membentuk opini dan pengetahuan bagi khalayak (Syarif & Bungin, 2021:36). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemangku kepentingan untuk memahami dinamika pemberitaan media dan dampaknya terhadap penerimaan masyarakat terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pembingkai media dalam berita Peraturan Gubernur Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta yang dibingkai oleh Media *Online* Detik.com dan Kompas.com?”

Merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai landasan awal dalam mengkaji dan membedah isu yang diangkat dalam penelitian ini sehingga dapat ditemukan kesenjangan penelitian. Penelitian terdahulu oleh (Rozi & Syukri, 2020:20) mengenai *podcast* Vice Indonesia dalam polemik poligami di Indonesia dengan berjudul “berbagi surga” menunjukkan lewat tayangan *podcast*nya Vice Indonesia membingkai poligami yang terjadi di Indonesia hanyalah sebatas nafsu belaka. Di sisi lain, media ini juga menekankan agar perempuan-perempuan di Indonesia bisa mempertahankan hak asasinya dan menjunjung tinggi paham feminisme.

Berikutnya penelitian oleh (Sunaryanto et al., 2022:74) mengenai berita anjuran poligami kader Partai Keadilan Sejahtera yang dibingkai oleh CNN Indonesia, Kompas, dan Sindonews.com dengan menggunakan analisis framing Zhongdang Pan dan Kosicky menunjukkan ketiga media tersebut berusaha untuk menuliskan berita secara objektif dan tidak memasukkan opini pribadi dalam beritanya. Dan tiga media ini tidak menggunakan struktur berita 5 W dan 1 H secara lengkap dalam informasi yang mereka beritakan kepada khalayak.

(Halwati et al., 2022:335) mengenai konstruksi gender dalam media islam dan sekuler dengan analisis pembingkai berita poligami, pernikahan dini, dan KDRT yang dibingkai oleh Kompas dan Republika menunjukkan terdapat perbedaan bingkai berita di kedua media yang menjadi subjek penelitian tersebut. Kompas melihat isu permasalahan ini sebagai perilaku yang mendorong perilaku destruktif di masyarakat sedangkan Republika sebagai media berideologi islam melihat perilaku poligami, pernikahan dini, dan KDRT sebagai perilaku yang sangat tidak dianjurkan dalam agama islam karena tidak sesuai dengan nilai dan norma islam.

Mengacu pada tiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut, hingga saat ini belum ada penelitian analisis *framing* terkait dengan berita kebijakan poligami ASN yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam melihat kesenjangan penelitian ini, peneliti terdorong untuk mengkaji permasalahan yang mengundang polemik ini. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pembingkai media dalam berita Peraturan Gubernur Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta yang dibingkai oleh Media *Online* Detik.com dan Kompas.com. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang peran media dalam membentuk wacana publik serta kontribusinya terhadap pemahaman masyarakat tentang isu-isu kebijakan yang kontroversial.

## **METODE PENELITIAN**

(Moleong, 2016:49) Paradigma merupakan cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang tujuan dari sebuah realitas. (Mulyana, 2018:7) mengatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif dengan menggunakan beragam metode untuk mengkaji permasalahan penelitian. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kata-kata dan narasi dalam analisis ini.

Fokus dalam penelitian ini yaitu analisis bagaimana media Detik.com dan Kompas.com membingkai berita peraturan gubernur poligami ASN yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan analisis *framing* Robert N Entman yang terdiri dari dua dimensi besar yakni seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu serta empat elemen *framing* yakni menjabarkan persoalan, menetapkan sumber penyebab masalah, menentukan keputusan moral, dan menetapkan jalan keluar permasalahan (Eriyanto, 2018:220). Dengan menggunakan pendekatan analisis framing, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kedua media tersebut menyajikan sudut pandang mereka terhadap kebijakan ini, termasuk penggunaan bahasa, penonjolan isu tertentu, dan cara penyajian fakta.

Peneliti mengambil objek penelitian yang dianalisis yaitu berita Detik.com dan Kompas.com terkait dengan berita peraturan Gubernur poligami ASN oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta edisi 17-21 Januari 2025. Latar belakang peneliti mengambil edisi tersebut karena saat tanggal 17 Januari 2025 muncul informasi penetapan peraturan Gubernur tentang ASN yang diperbolehkan untuk poligami pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2005 yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian. Dari tanggal 17 Januari sampai tanggal 21 Januari 2025 berita tersebut sedang ramai diberitakan oleh media massa dalam hal ini Detik.com dan Kompas.com yang merupakan media *online* terbesar di Indonesia.

**Tabel 1: Berita Detik.com**

No.	Judul Berita	Edisi	Jam Tayang
1.	Pergub Atur Izin ASN Poligami : Pemprov Jakarta Cegah Nikah Siri Diam-Diam	Jumat, 17 Januari 2025	17:01 WIB
2.	PSI Jakarta Kritik Pergub Poligami Dinilai Tak Adil Bagi Perempuan	Jumat, 17 Januari 2025	21:05 WIB
3.	Ahok Ingatkan ASN Jakarta Jangan Korupsi Karena Alasan Poligami	Sabtu, 18 Januari 2025	20:26 WIB
4.	Soal Pergub Poligami : Kenneth DPRD DKJ Banyak Persoalan Yang Lebih Penting	Minggu, 19 Januari 2025	22:16 WIB
5.	Wamendagri Soal Pergub Poligami Supaya ASN Tak Gampang Kawin Cerai	Senin, 20 Januari 2025	12:03 WIB

**Tabel 2: Berita Kompas.com**

No.	Judul Berita	Edisi	Jam Tayang
1.	Aturan ASN Jakarta Boleh Poligami Dinilai Bertentangan Dengan Perjuangan	Sabtu, 18 Januari 2025	15:41 WIB
2.	Dinilai Diskriminatif Pergub ASN Jakarta Boleh Poligami Harus Ditinjau Ulang	Minggu, 19 Januari 2025	14:18 WIB
3.	Ayah Poligami Bisa Pengaruhi Psikologis Anak Hingga Dewasa	Senin, 20 Januari 2025	21:33 WIB
4.	Mendagri Klaim Pergub Poligami ASN Jakarta Untuk Lindungi Para Istri	Selasa, 21 Januari 2025	09:31 WIB
5.	Aturan ASN Boleh Poligami Orangtua Perlu Pikirkan 4 Dampak Ini Terhadap Anak	Selasa, 21 Januari 2025	15:05 WIB

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Empat Elemen *Framing* Detik.com dan Kompas.com

Robert N Entman melihat bagaimana seorang jurnalis dapat memahami sebuah realitas peristiwa yang nantinya akan dikonstruksi ke dalam suatu wacana pemberitaan. Elemen kedua yakni bagaimana sebuah permasalahan dapat didefinisikan dengan melihat pada sumber penyebabnya. Setelahnya elemen ketiga yaitu menentukan aspek moral dalam sebuah permasalahan. Serta yang keempat yakni melihat pada jalan keluar penyelesaian masalah yang ditonjolkan dalam sebuah berita. Sehingga, pada pemberitaan Peraturan Gubernur Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta di Detik.com dan Kompas.com edisi 17 Januari – 21 Januari 2025 menunjukkan terdapat pemingkakan berita. Berikut di bawah ini *framing* berita di Detik.com dan Kompas.com:

**Tabel 3: *Framing* Berita Detik.com dan Kompas.com**

No.	Analisis <i>Framing</i>	Detik.com	Kompas.com
1.	Menjabarkan Persoalan	Detik.com menonjolkan komentar dari beragam politisi turut mengkritik Pergub Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta yang menuai konflik.	Kompas.com menonjolkan informasi dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya penetapan Pergub Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta.

2.	Menetapkan Sumber Penyebab Masalah	Detik.com melihat dengan adanya Pergub Nomor 2 Tahun 2025 ini dinilai banyak mendatangkan sumber permasalahan baru.	Kompas.com menempatkan isu poligami menjadi hal sensitif di masyarakat terutama pada permasalahan kesetaraan gender.
3.	Menentukan Keputusan Moral	Detik.com menilai Pergub ini dianggap sebagai kebijakan yang tidak ramah dan merugikan bagi perempuan serta berpotensi membahayakan perempuan.	Detik.com menilai Pergub ini tidak mencerminkan keberpihakan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.
4.	Menetapkan Jalan Keluar Permasalahan	Detik.com menekankan agar penetapan Pergub ini dievaluasi lagi mengingat banyak persoalan lain di Jakarta yang perlu untuk lebih diprioritaskan.	Kompas.com menekankan supaya Pergub ini harus berlandaskan pada perspektif keadilan sehingga perlu untuk ditinjau kembali.

## **b. Dua Dimensi Besar *Framing* Entman**

### **Seleksi Isu dan Penekanan Aspek Tertentu Detik.com**

Pada berita pertama Detik.com, redaksi melihat isu Pemprov DKI Jakarta yang telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian. Penekanan yang ditampilkan dalam berita pertama ini yaitu berangkat pada permasalahan yang terjadi di Indonesia para ASN pria menikah lagi tanpa sepengetahuan oleh istri sahnya dan memilih jalan alternatif untuk menikah siri. Permasalahan ini menjadi rujukan Pemprov DKI Jakarta agar kedepannya terdapat sebuah aturan baru yang lebih memperketat para ASN pria yang ingin menikah lagi dengan mengetahui batasan dan persyaratan ketat yang harus dipenuhinya.

Detik.com dalam berita kedua menyoroti reaksi kritik dari politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yaitu Elva Farhi Qolbina selaku Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI terhadap Pergub Poligami ASN yang baru ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan menuai kritik. Penekanan informasi yang diutamakan dalam berita ini yaitu dengan melihat pada tanggapan Elva yang ragu akan peraturan gubernur baru ini justru dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru dan terutama merugikan martabat kaum perempuan. Alhasil Elva mengkritisi

---

Pergub Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta ini hanya berpihak kepada kaum laki-laki sedangkan kaum perempuan lagi-lagi hanyalah sebatas kaum yang semakin termarginalkan.

Selanjutnya pada berita ketiga, Detik.com membahas tanggapan keras dari Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dikenal dengan panggilan 'Ahok' juga ikut mengomentari Pergub Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta. Ahok menilai pergub baru ini menjadi ajang kesempatan bagi ASN pria untuk bisa melakukan poligami. Tetapi hal yang ditekankan oleh Ahok melalui pemberitaan di Detik.com kali ini yaitu dengan mengkritisi para ASN pria yang ingin melakukan poligami jangan sampai tidak adil dengan pilihannya dan justru membuat ketidakadilan di hubungan rumah tangga. Dalam permasalahan ini, Ahok mengultimaturnya para ASN pria jikalau ingin berpoligami jangan sampai melakukan korupsi hanya untuk menafkahi keluarganya karena itu merupakan sebuah bentuk pelanggaran baru.

Berlanjut pada berita keempat, Detik.com kembali memuat informasi kritik dari kalangan politisi yang dalam berita ini menayangkan komentar keras dari Hardiyanto Kenneth selaku Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penekanan yang diutamakan oleh Detik.com dalam berita ini adalah melihat pada kritik dari Kenneth yang menayangkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang justru tidak fokus dalam mengurus persoalan lain yang lebih fundamental. Kenneth mengkritisi Pergub Poligami ASN ini bukanlah sebuah hal krusial yang harus diselesaikan dan cenderung untuk mengabaikan persoalan-persoalan lain yang pada dasarnya jauh untuk lebih diutamakan.

Detik.com dalam berita kelimanya membahas pernyataan resmi dari pemerintah pusat yang diwakilkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yakni Bima Arya. Penekanan informasi yang dimuat oleh Detik.com dalam pemberitaan ini terkait dengan komentar Bima Arya yang menyatakan Pergub Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta ini sejatinya merupakan sebuah kebijakan yang dapat melindungi kaum perempuan karena semakin ketat bagi ASN pria yang ingin menikah lagi atau melakukan poligami. Sehingga, dengan adanya kebijakan ini diharapkan semakin memperketat ASN pria dan semakin membuat para ASN pria lebih bertanggung jawab atas tindakan dan perilaku yang telah dibuatnya dengan berani untuk melakukan poligami lagi.

---

### **Seleksi Isu dan Penekanan Aspek Tertentu Kompas.com**

Pada berita pertama Kompas.com, redaksi melihat isu Pergub Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta dengan memuat komentar dari Politikus PDI Perjuangan sekaligus sebagai Pemerhati Perempuan dan Anak Diah Pitaloka yang mengkritik keras pergub baru ini. Hal yang ditonjolkan oleh Kompas.com dalam berita ini adalah melihat pada tanggapan dari Diah Pitaloka terhadap pergub yang menuai polemik ini sebagai kebijakan yang justru membuat perjuangan kesetaraan gender perempuan semakin mundur. Artinya dari Pergub Poligami ASN ini memicu adanya konflik yang merugikan kaum perempuan sehingga kebijakan ini perlu untuk dikaji ulang kembali mengingat perjuangan dan hak-hak perempuan harus selalu dijunjung tinggi agar kesetaraan gender dapat selalu tercapai.

Kompas.com dalam berita kedua menyoroti kritik keras dari Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Andy Yentriyani yang turut berkomentar atas peraturan gubernur yang baru ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta di awal tahun 2025 dan mengundang kontroversi. Detik.com menekankan informasi yang disampaikan oleh Andy dengan mengkritisi pergub poligami ini hanyalah sebagai sebuah kebijakan yang dibuat secara subjektif tanpa memandang lebih jauh efek dan dampak psikologis dari kaum perempuan. Terdapat beberapa syarat menurut Andy yang dinilai tidak ramah dan memposisikan perempuan hanyalah sebatas kaum yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Merujuk pada permasalahan ini, kemudian Detik.com menyimpulkan bahwa adanya syara-syarat administratif yang memperbolehkan laki-laki untuk poligami adalah sebagai sebuah hal yang justru mengabaikan kausalitas dalam hubungan suami istri.

Selanjutnya pada berita ketiga, Kompas.com membahas informasi dampak dari adanya perilaku poligami yang dilakukan oleh seorang ayah justru dapat memengaruhi psikologis anak dari kecil hingga dewasa. Pada berita ini, terkesan lebih berbeda dengan berita-berita yang sudah dimuat sebelumnya karena berita ini menitikberatkan pada efek atau konsekuensi logis dari adanya Peraturan Gubernur Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta yang baru saja ditetapkan. Kompas.com dalam memperkuat informasi dalam pemberitaan ini, dengan memuat komentar dari Jeanita Deli Wijaya, M.Psi selaku Psikolog Klinis *Analisis Personality Development* (APD) yang

menyatakan bahwa dampak dari poligami sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak dalam jangka kedepan.

Berlanjut pada berita keempat, Kompas.com menyoroti pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian yang berkomentar atas adanya peraturan gubernur yang baru ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan poligami ASN. Narasi yang dibangun oleh Kompas.com pada berita ini adalah menekankan sikap dari Mendagri yang mendukung ihwal kebijakan baru Pemprov DKI Jakarta walaupun banyak pertentangan di kalangan masyarakat. Mendagri menilai pergub ini membawa angin segar bagi para istri yang ditinggal oleh suaminya begitu saja, karena dengan adanya pergub ini membuat istri semakin terlindungi dan tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh suaminya karena ada aturan hukum yang justru lebih mengikat.

Kompas.com dalam berita kelimanya kembali membahas dampak yang ditimbulkan dari adanya perilaku poligami yang dilakukan oleh ASN pria sekaligus juga berperan sebagai ayah dalam lingkup keluarga. Pada berita ini, kompas.com lebih melihat sisi lain dengan memuat komentar dari Psikologi Klinis bidang keluarga, *parenting*, dan orang dewasa yakni Ratih Ibrahim, M.M yang juga turut berkomentar atas adanya Pergub Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta ini. Narasi komentar Ratih yang terdapat di dalam berita ini dengan mempertimbangkan pada dampak yang ditimbulkan dari perilaku poligami terhadap psikologis anak. Menurut Ratih, poligami adalah sebuah hal yang sangat berdampak pada karakter dan tumbuh kembang anak sehingga apabila tetap melakukan poligami dengan tidak mempertimbangkan psikologis anak, lagi-lagi anak menjadi korban atas perilaku tidak sesuai norma yang dilakukan oleh orang tuanya.

## **KESIMPULAN**

Merujuk pada analisis *framing* berita Peraturan Gubernur poligami ASN oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta edisi 17-21 Januari 2025, menunjukkan terdapat perbedaan pembedaan berita dari dua media *online* yang menjadi subjek penelitian ini. Detik.com membingkai isu pemberitaan polemik ini dengan melihat dari sisi politisi yang turut mengkritik Pergub Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta yang menuai kontroversi ini. Detik.com juga menekankan agar penetapan peraturan gubernur ini dievaluasi lagi mengingat banyak persoalan lain di Jakarta yang

perlu untuk diprioritaskan. Hal ini dibuktikan oleh Detik.com dengan menampilkan berita-berita yang berasal dari berbagai komentar dari kalangan politisi tersohor termasuk dari Anggota DPRD DKI Jakarta hingga Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok.

Sedangkan, Kompas.com meringkai pemberitaan Pergub Poligami ASN Pemprov DKI Jakarta ini dengan menyoroti informasi dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya penetapan peraturan gubernur baru ini. Kompas.com menekankan supaya pergub ini harus berlandaskan pada perspektif keadilan sehingga perlu untuk ditinjau kembali. Hal ini dibuktikan oleh Kompas.com dengan menunjukkan informasi berita yang bersumber dari kalangan praktisi yakni psikologi klinis *Analysis Personality Development* dan psikologi klinis *Parenting* hingga Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, H. (2019). *Kontestasi Politik dalam Ruang Media (Perspektif Critical Discourse Analysis)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Eriyanto. (2018). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang.
- Halwati, U., Alfi, I., Arifin, J., & Sirnopati, R. (2022). Konstruksi Gender dalam Media Islam dan Sekuler: Analisis Framing Berita Poligami, Pernikahan Dini, dan KDRT. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(2), 335–352. <https://doi.org/10.15642/jki.2022.12.2.335-352>
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rozi, F., & Syukri, F. A. (2020). Berbagi Surga: Poligami di Indonesia Dalam Bingkai Media Asing. *Al-Hikmah: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan*, 11(1), 20–28. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v11i1.1828>
- Sunaryanto, S., Syamsuri, A. R., & Ahmad Adnan. (2022). Berita Anjuran Poligami Bagi Kader Partai Keadilan Sejahtera di Media Online: Framing Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. *Jurnal Kopis: Kajian Penelitian Dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam*, 4(2), 74–93. <https://doi.org/10.33367/kpi.v4i2.2385>

Syarif, N., & Bungin, B. (2021). *Citra Aktor Politik Dalam Framing Media Lokal*. Jakarta: Prenada.

Wibisono, I. (2021). *Analisis Framing dalam Berita Politik*. Banyumas: Amerta Media.

Zamroni, M. (2022). *Relasi Kuasa Media Politik (Kontestasi Politik dalam Redaksi Berita Televisi)*. Jakarta: Kencana.